PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bambang Sunardi¹⁾, Hasnah Aziz²⁾, Siti Humulhaer³⁾

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, 15118

Email :¹⁾ sunardibambang452@gmail.com

Email :²⁾ haziz@unis.ac.id

Email :³⁾ pzulfikar@unis.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan luar biasa. Wujud perdagangan manusia yang marak terjadi antar negara adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal, Indonesia, bahwa kawasan Asia-Timur Tengah menjadi tempat yang sering terjadi perdagangan manusia Indonesia ilegal. Modus-modus yang dilakukan cukup banyak, antara lain penggunaan paspor di luar prosedur, dan penyalahgunaan paspor. Tujuan Penelitian Pertama Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang dan dampak dari tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal, Kedua Untuk mengerahui pengaturan, bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum khususnya terhadap pekerja migran Indonesia illegal berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia terhadap para pekerja migran illegal. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian Penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang karena kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib, budaya hidup yang konsumtif, tradisi perkawinan anak, berkembangnya bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan meningkatnya jaringan kejahatan terorganisir lintas batas negara, serta terjadinya diskriminasi dan persoalan gender. Aturan terkait UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia terhadap para pekerja migran illegal ialah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk para sponsor / calo yang merekrut CPMI untuk pertama kali di daerah asal CPMI tersebut. Padahal tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI di luar negeri banyak dilakukan para calo / sponsor yang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas para CPMI penipuan dan sebagainya. Sedangkan Aturan terkait UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang menyebutkan Human trafficking sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional.

Kata kunci: *Pidana, Perdagangan Orang, Penipuan*

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is an extraordinary crime. The form of human trafficking that is rampant between countries is the shipment of Illegal Indonesian Migrant Workers (PMI), Indonesia, that the Asia-Middle East region is a place where illegal Indonesian human trafficking often occurs. There are quite a lot of modes carried out, including the use of passports outside the procedure, and the misuse of passports. The purpose of the research is to find out and analyze the causes of the rampant crime of trafficking in persons and the impact of the crime of trafficking in persons against illegal Indonesian Migrant Workers, Second, to understand the arrangements, forms, mechanisms, and procedures of legal protection, especially for illegal Indonesian migrant workers, based on Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law Number 21 of 2007 concerning Human Trafficking against Workers illegal immigrants. The research method used is a normative juridical approach, with primary and secondary legal sources. Research Results The cause of the rampant crime of human trafficking is due to the habit of migrating to improve their fate, a consumptive life culture, the tradition of child marriage, the development of the business of sending labor abroad, and the increase in cross-border organized crime networks, as well as the occurrence of discrimination and gender problems. Regulations related to Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Law Number 21 of 2007 concerning Human Trafficking against illegal migrant workers are that Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers does not regulate criminal sanctions for sponsors/brokers who recruit CPMI for the first time in the area of origin of CPMI. In fact, many criminal acts related to the placement of CPMI abroad are carried out by brokers / sponsors which are the origin of criminal acts, such as falsification of documents, falsification of the identity of para. CPMI fraud and so on. Meanwhile, the Regulation related to Law No. 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons states that human trafficking is a crime against human rights which in this day and age has been organized internationally.

Keywords: *Crime, Human Trafficking, Fraud*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Perkembangan saat ini, Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan pekerja migran bagi negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, dan daya tarik upah yang besar di luar negeri dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi. untuk menjadi

Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, tentu memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa lisan atau pun tulisan. "Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat terhadap cara hukum memberikan keadilan dengan mengatur hak dan kewajiban subjek hukum serta memberikan keadilan bagi subjek hukum yang mempertahankan haknya". (Hadjon. 1987: 1-2.)

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang mau pun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada sebagai mana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 "hak dan kewajiban" Pasal 6 ayat (1). Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan hal penting bagi Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, karena sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di atas, berdasarkan Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban, dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak mana pun. Selanjutnya dalam Pasal 21 dinyatakan: Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. (Febriyanto, Triyan, 2018: 37).

Dengan ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka merupakan kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi warga negara Indonesia karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jendral Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu-satunya institusi yang secara realis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Disamping memberikan perlindungan yang bersifat teknis, dalam hal ini dapat berupa penyediaan penampungan (shelter) dan bantuan pemulangan (repatriation) berikut pengurusan dokumen perjalanannya bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri juga memberikan upaya perlindungan politis yang merupakan suatu instrumen yang tidak kalah penting karena tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak perlindungan Perwakilan Republik Indonesia terhadap warga negaranya hanya terbatas pada Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, yakni dibatasi oleh kedaulatan dan otoritas negara penerima. Sejak dahulu tugas seorang duta besar atau para pejabat diplomatik adalah mewakili negara di negara akreditasi dan sebagai penghubung antara pemerintah kedua negara.

Pada negara akreditasi, para tenaga kerja Indonesia mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Para tenaga kerja Indonesia juga melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya selama berada pada negara akreditasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi proteksi, yang berarti seorang duta melindungi pribadi, harta benda, kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara-negara pengirim, artinya negara pengirim boleh melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di negara tersebut. Dalam artian lain, perlindungan tenaga kerja Indonesia adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon tenaga kerja Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja (Syamsuddin, 2004: 34). Terhadap para tenaga kerja Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap perkara pidana yang dilakukan para tenaga kerja Indonesia di negara lain, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia, untuk menjamin proses pemeriksaan hingga putusan pengadilan keluar didampingi oleh perwakilan negara Indonesia sehingga mencegah adanya pelanggaran hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diganti dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan adanya undang-undang baru ini, semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada para Pekerja Migran Indonesia harus ditingkatkan. Secara yuridis bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Fungsi dari perlindungan hukum ini adalah untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun realitasnya banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas (Adharinal, 2012: 23). Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan kerja migran Indonesia di luar negeri, kemudian juga disebutkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Indonesia (PPMI) bahwa: "orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai dimaksud dalam pasal 69 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun kurungan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)". Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja Indonesia ke luar

negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja Indonesia atau perusahaan yang menempatkan pekerja Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jika merujuk pada penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pekerja pemberi yang berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI) dari menteri atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Sudah seharusnya regulasi atau Undang-undang yang disusun di negeri ini bisa mengatur kehidupan bangsa dan mampu memberikan manfaat demi kepentingan semua pihak, khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur bentuk perlindungan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan persoalan pekerja migran Indonesia sesungguhnya terdapat dua (2) aturan hukum yang kerap kali dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saling bersinggungan satu sama lain seperti tarik-menarik yang mana yang lebih mendominasi dalam menjatuhkan pidana atau menjerat para pelaku yang berkaitan dengan keberangkatan keluar wilayah Indonesia yakni dengan aturan hukum baik mengenai tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia mengenai maupun Tindak Pidana Perdagangan orang (Adnan Hamid, 2018: 4).

B. Metode

Penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sedangkan jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung suatu nilai (Marzuki, 2005:35). Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis yang akan menitik beratkan pada praktek pelaksanaan hukum positif dalam realitasnya di masyarakat dengan menggunakan data primer yang digunakan sebagai sumber dan diperoleh dengan penelitian lapangan.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian (Suryana, 2010). Suratman dan Phillips (2015:35) dalam bukunya, mengutip pendapat Bambang Sunggono yang menyatakan bahwa penelitian dan metode penelitian sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak dikatakan sama. Adapun metode yang akan digunakan

dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan ini mengkaji konsep normative atau yuridis perlindungan hukum pekerja migran (illegal) korban perdagangan orang dan implementasinya baik secara preventif maupun represif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan kualitatif tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda dengan halnya pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah. menemukan Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, KUHPidana dan sebagainya yang diperoleh dari undang-undang, buku, kepustakaan dan internet. (Ronny Hanutijo Sumitro, 1990:5).

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor utama penyebab terjadinya TPPO antara lain, karena kebiasaan “merantau” untuk memperbaiki nasib, budaya hidup yang konsumtif, tradisi perkawinan anak, berkembangnya bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan meningkatnya jaringan kejahatan terorganisir lintas batas negara, serta terjadinya diskriminasi dan persoalan gender. Kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja terlantar dan putus sekolah kemudian menjadi faktor pendorong penyebab kerentanan dan ketidakberdayaan korban masuk dalam jeratan para pelaku. Kepolisian Republik Indonesia mengidentifikasi berbagai modus yang berkembang dalam kasus-kasus TPPO. Selama dua belas tahun pelaksanaan Undang-Undang PTPPO dan berjalannya waktu pengungkapan kasus, modus-modus tersebut dapat dikelompokkan dalam dua masa, yaitu modus lama dan modus baru. Menurut Kepolisian modus lama yang menonjol adalah pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jati diri lainnya seperti paspor, kawin kontrak, migrasi tenaga kerja dengan menggunakan visa kunjungan pemberangkatan PMI informal melalui jalur non-prosedural, perekrutan dilakukan secara langsung oleh pelaku/jaringan pelaku, dan korban bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku. Sedangkan, modus baru diindikasikan dengan sering ditemukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan, kawin pesanan, visa kunjungan dan kemudian ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan mendapatkan status, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit, perekrutan melalui media sosial, dan korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku. Khusus kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan/kawin kontrak antara WNI dengan WN Tiongkok. Para korbannya sebagian masih berusia anak. Awalnya, korban direkrut dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada kenyataan justru korban dikawinkan. Korban dengan status sebagai istri, mengalami eksploitasi (disuruh bekerja, namun tidak diberi upah), mendapat kekerasan (seperti penyimpangan seksual dari pelaku, kekerasan fisik dan mental lainnya), dan transfer

perkawinan. Masalah utama dari modus ini adalah korban terikat perkawinan yang sah sesuai aturan yang berlaku di negara tujuan sehingga tidak mudah melindungi dan memulangkan korban, walaupun di Indonesia sudah terbukti secara hukum sebagai kasus TPPO dan pelakunya sudah ditahan. Bagi para sindikat perdagangan orang, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Selain itu juga sering muncul keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi contohnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Sering kali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak bukan hanya memberikan kontribusi bagi keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama penghasilan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran merupakan faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumendokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia. Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrutnya menjadi pelacur.

Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh trafficker karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan. Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Bisa juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa

masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh sebab itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang defenisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung deskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Interpretensi hukum yang berkembang terhadap pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya defenisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Dengan itu, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap semua bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan. Kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Dengan itu pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan orang untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Perlindungan bagi PMI yang bekerja di Luar Negeri dimulai dari dan terintegritas dalam setiap proses penempatan PMI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air, dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah diharapkan PMI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri (Adrian Sutedi, 2011: hlm. 243). Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Pelindungan Pekerja Migran yang diberikan kepada calon PMI untuk terjamin nya hak-hak-hak calon PMI. Dalam pemberian

Pelindungan kepada PMI diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Pasal 77 yang menyatakan bahwa Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan PMI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri. Pelindungan Hukum terhadap calon PMI atau PMI, dibedakan 3 kategori, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut:

1) Pelindungan Sebelum Bekerja.

Pelindungan Sebelum bekerja dikategorikan, meliputi: pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Pelindungan administratif yakni kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dari calon PMI dan penetapan kondisi kesehatan dan persyaratan kerja. Sedangkan Pelindungan teknis nya meliputi peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Pendampingan dan pelatihan yang belum berjalan secara optimal, artinya belum dijalankan secara rutin dan berkesinambungan yang diharapkan akan memberikan dampak langsung terhadap pesertanya. Heterogeneritas para peserta pemberdayaan juga menjadi kendala, karena materi yang disampaikan sangat umum, padahal peserta memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda antar peserta pelatihan ini. Melalui Balai Latihan Kerja (BLK) para calon PMI wajib memenuhi syarat berdasarkan rating yang diberikan oleh BLK, bagi yang tidak memenuhi kualifikasi rating diharapkan dapat bergabung atau menggabungkan diri agar memenuhi persyaratan. Sementara itu bagi BLK yang memang menyimpang dari peraturan dan sama sekali tidak memenuhi syarat akan dibubarkan. Pelindungan teknis meliputi pula Jaminan Sosial calon PMI ,fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, dan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah pun telah meluncurkan program Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) melalui BNP2TKI. BKLN dirancang dengan melibatkan secara aktif stakeholders ditingkat bawah terutama pemerintah daerah dan dinas terkait, serta pihak swasta termasuk didalam nya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Eggi Sudjana, 2009: hlm. 150).

Melalui BKLN ini diharapkan pelayanan menjadi cepat karena sistem Bursa Kerja Terintegrasi dalam sistem informasi pasar kerja secara terpadu. Proses persentuhan dengan calo semakin diminimalisir, karena masing-masing peminat dan calon PMI dapat langsung berhubungan dengan tempat bursa kerja yang diselenggarakan di daerah setempat. Secara konsepsional adanya kedekatan bursa kerja dengan calon PMI diharapkan biaya yang dikeluarkan semakin rasional dan terjangkau. Kecepatan pengurusan dokumen akan dapat ditingkatkan karena sistem terintegrasi dan didukung oleh teknologi informasi, sehingga meminimalisir persentuhan pejabat birokrasi secara langsung dengan calon PMI yang ingin menyogok. Mereka melakukan kegiatan dalam sistem yang terintegrasi untuk megoptimalkan proses pelayanan dan sosialisasi kepada calon PMI. Paralel dengan upaya tersebut, kualitas PMI juga menjadi perhatian utama dengan meningkatkan kualitas Latihan kerja. Balai atau Lembaga yang melakukan pelatihan akan dievaluasi dengan melakukan rating berdasarkan prinsip dan parameter organisasi yang baik. Salah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada calon PMI dalam menciptakan pelayanan pengurusan dokumen yang murah dan cepat sehingga meminimalisir kemungkinan calon dan memangkas birokratisasi yang selama ini dikeluhkan

sangat memberatkan. Jika di dalam negeri pemerintah mampu memberikan perlindungan PMI secara baik, maka negara lain akan sulit memanfaatkan PMI atau mencari celah untuk mengabaikan hak-hak PMI.

2) Pelindungan Selama Bekerja

Pelindungan selama bekerja di luar negeri, meliputi: pendataan dan pendaftaran oleh dinas ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak PMI selama bekerja di Negara setempat, memberikan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian bisa memonitor setiap langkah perjalanan PMI tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan PMI bisa ditelusuri letak kesalahannya, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan tidak akan terjadi saling menyalahkan antar lembaga tersebut. Pemerintah melakukan upaya monitoring kepada PMI yang sistematis dan pemantauan yang melembaga dan terkoordinir baik dari Pemerintah Pusat dan atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.

Teknis pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan waktu yang disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Melalui Lembaga Monitoring ini dilakukan secara proaktif atau melalui PMI sendiri yang melapor keberadaannya kepada petugas yang ditunjuk dan dilakukan dengan monitoring kunjungan ke tempat PMI bekerja (home visit). Home Visit dimaksudkan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang dapat diterima kedua belah pihak antara PMI dan Majikan dengan acuan pada perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya. Dan home visit dilakukan untuk memastikan tindakan lanjutan berupa counselling untuk penyelesaian persoalan. Counselling diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat sifat dan kondisi hubungan kerja yang kurang baik sehingga menimbulkan perilaku menyimpang (Eggi Sudjana, 2009: hlm. 155). Jika upaya counselling tidak mampu mengatasi keadaan sehingga terjadi persoalan yang lebih serius dalam bentuk kekerasan, maka yang dilakukan tindakan penyelamatan awal (Rescue) terhadap PMI yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan keberadaan PMI dalam proses hubungan kerja. Lembaga Monitoring bekerja pada saat waktu 6 bulan pertama sejak PMI melaksanakan pekerjaannya. Melalui kontak atau telepon Lembaga Monitoring menanyakan kondisi dan keadaan hubungan antara PMI dan majikan. Lembaga monitoring dapat berjalan baik, maka peranan tempat penampungan sementara (shelter) bagi para PMI yang menghadapi persoalan hubungan kerja di tempat kerja tidak begitu mendesak urgensinya.

Keberadaan Lembaga Monitoring diperlukan untuk mencegah semakin meningkatnya kasus-kasus pelecehan dan penganiayaan PMI khususnya terhadap pekerja dari sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT). Dengan mengawasi dan memantau mereka diharapkan dapat diminimalisir terjadinya kasus pelanggaran hak-hak pekerja. Tujuan utama lembaga monitoring adalah untuk melakukan tindakan preventif terhadap kasus-kasus yang berpotensi serius seperti kekerasan dan pembunuhan. Kemudian mengharmonisasikan hubungan PMI

dengan majikan dengan cara menjabatani dan memediasi berbagai persoalan yang potensial mengganggu hubungan kerja yang berujung pada terjadinya tindak pelecehan dan pelanggaran sebagaimana yang sering diberitakan oleh media massa. Langkah yang dilakukan tidak harus dengan kunjungan dan melihat keadaan mereka (PMI) secara langsung karena sangat mahal biaya, waktu dan fleksibilitasnya. Penggunaan media telepon, sms, atau perangkat teknologi yang lain merupakan opsi yang dapat digunakan untuk memantau secara acak kondisi umum PMI. Bila PMI merasakan ada ancaman potensial yang tidak mungkin diatasinya, maka secara bersama-sama dapat diupayakan untuk mencegahnya. Mekanisme pemantauan semacam ini adalah langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan langkah lainnya agar mencapainya secara efektif. Pihak yang paling utama perannya adalah PMI dan majikan, selain sikap proaktif pihak yang memonitor. Pihak yang memonitor ini secara eksternal harus bekerja sama erat dengan pihak-pihak lain dinegara penempatan, khususnya pemerintah setempat dan kalangan Non Governmental Organisation (NGO). Secara internal lembaga monitoring harus bekerjasama dengan agen pengarah dinegara tujuan dan khususnya dengan majikan, sehingga proses monitoring dapat berjalan efektif dan tidak dirasakan mengganggu proses kerja PMI dan privasi majikan. Harus diupayakan mekanisme pemantauan atau pengawasan sehingga keberadaan lembaga monitoring justru akan memacu produktifitas kerja PMI dan membuat rasa aman majikan. Tetapi, dalam kenyataannya permasalahan selalu ada dan sulit dihindarkan oleh berbagai sebab. Meskipun, sudah dilakukan monitoring dan berbagai langkah antisipatif lainnya. Dalam melakukan aktivitasnya, lembaga monitoring ini dibiayai oleh PMI atau Majikan PMI, sebagai bentuk komitmen dan kesungguhannya dalam memperkerjakan PMI dari Indonesia. Adapun pihak-pihak yang ditugaskan mengelola lembaga monitoring menjadi kewenangan pihak-pihak di negara penempatan. Pihak ini bisa terdiri dari pihak swasta atau agen yang ditunjuk atau juga oleh pemerintah setempat atau kedua-keduanya. Pihak Indonesia pun dilibatkan dalam mengelola lembaga monitoring, terutama dalam melakukan counselling terhadap PMI.

Jika Lembaga Monitoring dapat berjalan baik maka peranan tempat penampungan (Shelter) bagi para PMI yang menghadapi persoalan hubungan kerja di tempat kerja tidak begitu mendesak Tetapi dalam kenyataannya, permasalahan tersebut kerap terjadi, meskipun berbagai langkah antisipatif lainnya sudah dilakukan. Keberadaan shelter merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sebagai tempat persinggahan bagi PMI atau siapa saja warga Indonesia yang menghadapi persoalan di Luar Negeri (Eggi Sudjana, 2008: hlm. 156). Shelter dibentuk oleh pihak swasta atau yang memiliki kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Shelter bagian penting dari upaya diplomasi Indonesia khususnya dalam melindungi kepentingan warga negaranya di negara setempat. Idealnya dalam shelter terdapat berbagai pelayanan yang dapat digunakan oleh PMI. Contohnya jasa pengacara dan psikolog. Keberadaan pengacara di negara setempat dan di dampingi oleh pengacara dari Indonesia yang secara khusus bertugas untuk menangani persoalan warga negara Indonesia. Sedangkan keberadaan Psikolog bertugas untuk memberikan counselling atau tugas lain yang berkaitan dengan upaya memulihkan semangat dan mental PMI yang menderita perlakuan buruk atau menghadapi persoalan tempat kerja.

Kehadiran psikolog asal Indonesia diharapkan lebih mengerti dan mampu memberikan rasa empati atas dasar penderitaan yang dialami oleh PMI. Kasus-kasus yang sering menimpa PMI adalah gaji yang tidak terbayar, tindakan kekerasan atau penganiayaan, pelecehan seksual

atau pemerkosaan, dan bahkan dijadikan Pekerja Seks Komersial atau PSK. Sehingga, peranan psikolog sangat menentukan mental health seorang PMI. Dalam menangani kasus-kasus seperti ini shelter harus dilengkapi dengan jumlah tenaga psikolog yang mencukupi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai maka akan kesulitan untuk mencapai kinerja yang baik, sehingga shelter akan menjadi tempat penampungan PMI yang bermasalah. Menyelesaikan persoalan tidak mudah dilakukan khususnya jika PMI yang bersangkutan menghadapi persoalan serius yang penyelesaiannya melibatkan berbagai pihak, terutama majikan. Masalahnya akan memerlukan waktu yang lama jika tidak terjalin kompromi atau musyawarah, melainkan harus menempuh prosedur hukum atau pengadilan. Waktu penyelesaian pun tergantung pada cepat atau tidaknya hasil musyawarah kesepakatan antara majikan dan agency dengan PMI yang bersangkutan. Shelter untuk para PMI dinegara tempat mereka bekerja dapat disebar ke berbagai daerah atau wilayah dalam satu negara.

3) Pelindungan Setelah Bekerja.

Pelindungan setelah bekerja yang dilakukan oleh Pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, meliputi: fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia, yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib melaporkan data kepulangan PMI atau ingin memperpanjang Perjanjian Kerja PMI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Artinya ada keharusan bahwa P3MI bekerja sama dengan Mitra Usaha dan Perwakilan Luar Negeri mengurus kepulangan PMI sampai di bandara Indonesia, dalam hal perjanjian kerja telah berakhir dan tidak memperpanjang perjanjian kerja tersebut, dan untuk PMI yang bermasalah, sakit atau meninggal dunia, selama masa perjanjian kerja sehingga tidak dapat menyelesaikan perjanjian kerja tersebut (Fathor Rahman, 2011: hlm.91). Jika PMI tersebut meninggal, P3MI berkewajiban untuk memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut, mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan, memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan, mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan, memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya dan mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima. Dalam mengurus kepulangan PMI, P3MI bertanggung jawab membantu penyelesaian permasalahan PMI, dan mengurus atau menanggung kekurangan biaya perawatan PMI yang sakit. Pembaharuan dalam sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dapat dilihat dengan keluarkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sistem

Penempatan Satu Kanal ini lahir dari inisiatif kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) untuk menempatkan melalui kesepakatan program SPSK sebagai komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran khususnya ke Arab Saudi melalui peningkatan kompetensi, transparansi informasi dan proses penempatan serta optimalisasi perlindungan. Berdasarkan diktum kedua Kepmenaker 291/2018, SPSK merupakan sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara online antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan yang berada di bawah kendali Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mencegah penempatan PMI non procedural yang rentan menjadi korban human trafficking. Harapannya sistem ini juga dapat dilakukan dengan di negara penempatan lain melalui kerjasama bilateral. Sudah sepatutnya pemerintah Indonesia mengedepankan perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri dengan mampu memasukan hukum nasionalnya ke dalam sistem hukum negara lain apa bila menyangkut keamanan negara dan keselamatan rakyatnya. Terkait hal ini sudah diterapkan oleh negara seperti Perancis, Bulgaria, dan China (Widyawati, 124:2017).

D. Kesimpulan

1. Penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang karena kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib, budaya hidup yang konsumtif, tradisi perkawinan anak, berkembangnya bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan meningkatnya jaringan kejahatan terorganisir lintas batas negara, serta terjadinya diskriminasi dan persoalan gender. Kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja terlantar dan putus sekolah kemudian menjadi faktor pendorong penyebab kerentanan dan ketidakberdayaan korban masuk dalam jeratan para pelaku. Adapun dampak dari tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kerugian yang dialami oleh korban yaitu berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental dan trauma berat bahkan dapat menyebabkan pula kematian.
2. Pengaturan, bentuk, mekanisme, dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa: Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan bagi PMI yang bekerja di Luar Negeri dimulai dari dan terintegritas dalam setiap proses penempatan PMI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika

- pulang ke tanah air, dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah diharapkan PMI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.
3. Aturan terkait UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia terhadap para pekerja migran illegal ialah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk para sponsor / calo yang merekrut CPMI untuk pertama kali di daerah asal CPMI tersebut. Padahal tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CPMI di luar negeri banyak dilakukan para calo / sponsor yang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas para CPMI penipuan dan sebagainya. Sedangkan Aturan terkait UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang menyebutkan Human trafficking sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia yang pada zaman sekarang ini sudah terorganisir secara internasional. Maka dari itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang haruslah didorong oleh aturan hukum internasional yang tegas dan komitmen oleh beberapa negara agar mekanisme pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Referensi

A. Buku

- Anderson, James, *Public Policy-Making*, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979.
- Abdurrachman, *Hukum dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 1978.
- Abel, Richard L. (ed.), *The Law and Society*, New York University Press, 1995.
- Adjie, Oemar Seno, *Peradilan bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980.
- Agusminah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001.
- Armia, Mhd, Shiddig TGK, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitaa, 2003.
- Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Rajawali Press, 1993.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Atiyah, PS., *Law and Modern Society*, New York, Oxford University Press, 1995
- Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rim Situasi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia, Jakarta, 2003.
- Bagun, Rikard dan Servas pandur (Penyunting), *Hak Asasi Dalam Tajuk*, Jakarta, Institut Ecata, 1997.
- Bahagijo, Sugeng dan Asmara Nababan (Ed), *Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara*,

- Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.
- Bakir, Zaenab, *Angkatan Kerja di Indonesia*, CV. Rajawali, 1984.
- Bellamy, Richard, *Teori Sosial Modern*, Jakarta, LP3ES, 1987.
- Bertens, K, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta, PT. Gramedia, 1990.
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 2004.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, New York, Academic Press, 1975.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, USA, West Publishing Company, 1979.
- Brownlie, Ian (Ed), *Basic Document on Human Right*, Oxford, Clarendon, 1981.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Chambliss, William and Seidman Robert, *Law, Order and Power*, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company, 1982.
- Pramudya, *Hukum Itu Kepentingan*, Salatiga, Sanggar Mira Sabda, 2007.
- Prints, Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1992.
- Ramlinger, V, Gaston, *Capitalism and Human Rights*, Daedalus, 1983.
- Rokhani, Endang, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*, Jakarta, Yakuma PGI, 2002.
- Samekto, FX, Adji, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, PT. Cotra Aditya Bakti, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Imtermasa, 1987.
-, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1999.
-, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2001.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bamdung, Binacipta, 1977.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1994.
- Syamsuddin, Mohd. Syaufil, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta, Sarana Bhakti Persada, 2004.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT. Refina Aditama, 2001.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Waluyu Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Wawa, Jannes Eudes, *Irono Pahlawan Devisa (Kisah Tenaga Kerja Indonesia Dalam Laporan Jurnalistik)*, Jakarta, Kompas 2003.
- Widodo, Hartono, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta, Rajawali Press, 1992.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar grafika, 2009.
- Yustika, Ahmad Erani, *Negara vs Kaum Miskin*, Yogyakarta, Putaka Pelajar, 2003.
- Yuwono, *Produktivitas dan Tenaga Kerja Indonesia*, PT. Aphabetica Indah Indonesia, 1985.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Hak dan Kewajiban Hukum TKI di Luar Negeri*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU RI Nomor 26 tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

UU RI No. 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman pr Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Pentiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan martabat Manusia).

UU RI No. 20 tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 38 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

UU RI No, 12 tahu 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

UU RI No. 18 tahun 2003 Tentang Advocat

Perpu No. 1 tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perpu No. 8 tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-137/MEN/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pdelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-157/MEN/2003 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-104A/MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja keluar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 14/MEN/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI du Luar Negeri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER 03/KA/III/2010 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Memorandum of Understanding on The Recruitment of Indonesian Workers between The Guberment of The Republic of Indonesia and The Governenr of Uni Emirat Arab.

C. Jurnal

Buletin Pusat Litbang Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI. Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Majalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja RI, Vol. II No. 1.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Laporan kegiatan Program Jaksa Magang Pada Atase Hukum KBRI Riyadh Saudi Arabia tahun 2018